



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BANJAR**

2026

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR**



Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No.3 RT.05 RW.03
Telp. (0511) 6749084 Martapura 70651
Website : disdik.banjarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini dapat disusun secara tepat waktu, akurat, dan berbasis data. Laporan ini merupakan manifestasi komitmen institusi terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan selama periode triwulan II berjalan.

Laporan ini menyajikan capaian indikator kinerja utama secara terukur dan objektif, disertai analisis kritis terhadap tingkat pencapaian, kesenjangan yang terjadi, serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja. Selain itu, dirumuskan pula langkah-langkah strategis dan tindak lanjut yang terarah guna memperkuat efektivitas, efisiensi, serta kualitas implementasi program pendidikan di Kabupaten Banjar.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, serta para pemangku kepentingan yang telah menunjukkan dedikasi, sinergi, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program serta penyusunan laporan ini. Kolaborasi yang solid menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan.

Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja, dasar pengambilan kebijakan, serta acuan dalam perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan di Kabupaten Banjar.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, Juli 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



Hj. Liana Penny, ST.,MS

Pembina Tk. I

NIP. 198007122005012013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Maksud dan Tujuan..... 1

B. Tugas dan Fungsi 1

3. Dasar Hukum 2

4. Struktur Organisasi 3

C. Isu Strategis 1

D. Sistematika Penyajian..... 1

BAB II 2

PERENCANAAN KINERJA 2

A. TUJUAN PERANGKAT DAERAH 2

B. SASARAN PERANGKAT DAERAH 2

BAB III 9

AKUNTABILITAS KINERJA..... 9

A. Capaian Kinerja Organisasi 9

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tujuan 9

2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Sasaran Strategis..... 10

4. Membandingkan Realisasi Sasasaran Strategis Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis..... 49

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi dan Nasional 50

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 52

B. Realisasi Anggaran 53

1. Realisasi Jenis Belanja 54

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 54

BAB IV 63

PENUTUP 63

LAMPIRAN 67

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menyajikan informasi yang akurat, mutakhir, dan terukur mengenai perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagai dasar pemantauan kinerja.;
- b. Menyajikan data perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara rinci, transparan, dan akuntabel guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan;
- c. Mengidentifikasi secara sistematis kendala, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja;
- d. Merumuskan alternatif solusi yang strategis, aplikatif, dan berkelanjutan dalam rangka memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

- a. Laporan Kinerja disusun untuk menyajikan gambaran yang akurat, terukur, dan berbasis data mengenai tingkat pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai instrumen utama pengendalian kinerja;
- b. Laporan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, yang selanjutnya menjadi dasar perumusan langkah perbaikan yang terarah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada periode berikutnya;
- c. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja instansi pemerintah, sehingga memberikan akses informasi yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- d. Laporan Kinerja berfungsi sebagai landasan strategis dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun berikutnya, guna memastikan bahwa program yang dirancang lebih tepat sasaran, efektif, dan selaras dengan tujuan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah seperti.

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sarana prasarana pendidikan dasar;
- b. Mengusulkan pemberian bantuan pada pendidikan dasar;
- c. Melaksanakan pemetaan akreditasi sekolah;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG);
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama, serta Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang pendidikan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pendidikan;
- e. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas; dan,
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Dasar Hukum

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan di bidang pendidikan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar berlandaskan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 8).
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 100.3.3 / 195 / DISDIK / 2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

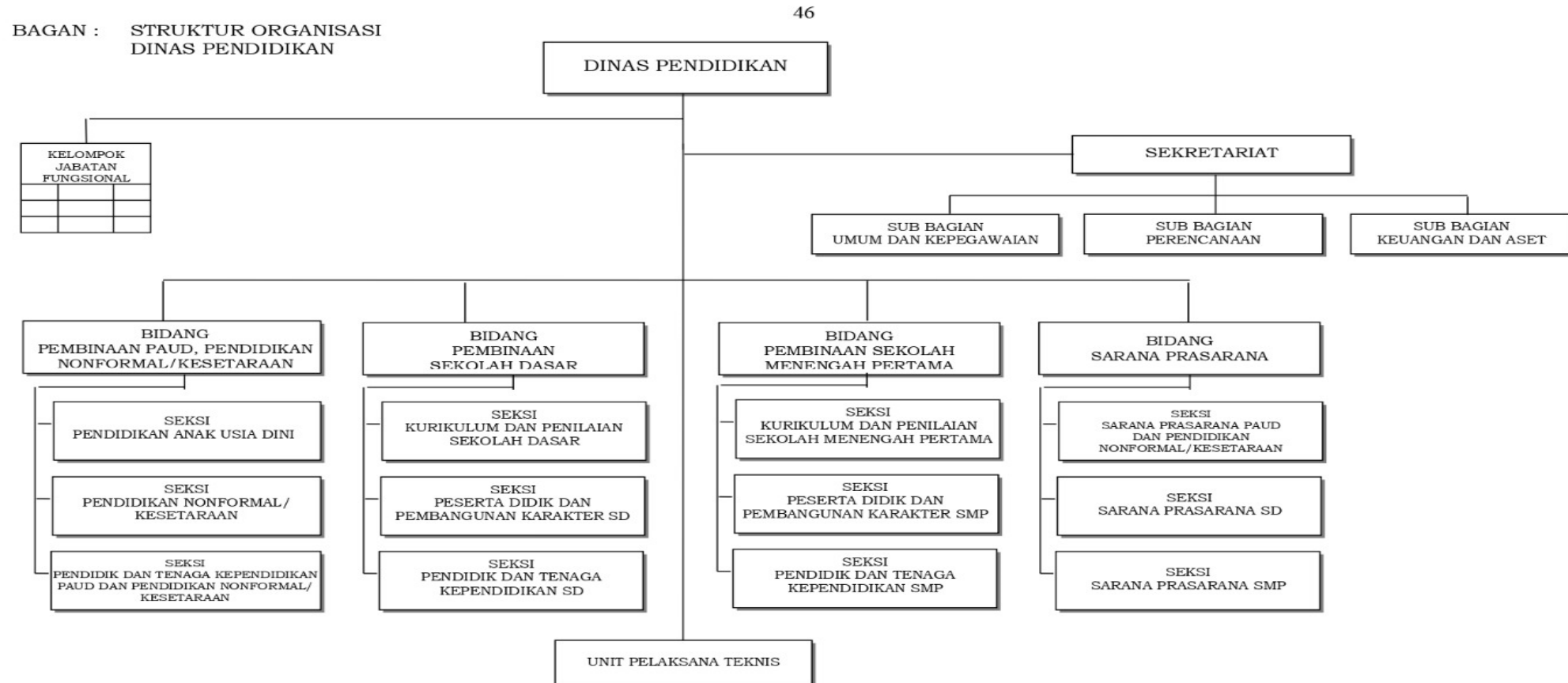
4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Subbagian Perencanaan
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- f. Bidang Sarana Prasarana terdiri dari:
 1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2026



5. Kepegawaian

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan secara terencana dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pada tahun pelaporan, Dinas Pendidikan didukung oleh pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN, dengan komposisi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Penataan dan pemanfaatan pegawai diarahkan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten dalam mendukung penyelenggaraan urusan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sesuai kewenangan daerah. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, Dinas Pendidikan secara berkelanjutan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, manajemen sekolah, dan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan

	Jabatan	Eselon				Golongan							Tingkat Pendidikan					Jlh
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	IX	V	III	S3	S2	S1	D3	SMA	
	Kepala Dinas		1			1								1				1
	Sekretaris			1		1								1				1
	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			1			1							1				1
	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar			1		1								1				1
	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama			1		1								1				1
	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana			1			1							1				1
	Kasubbag Perencanaan				1		1								1			1
	Kasubbag Keuangan dan Aset				1		1								1			1
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				1		1								1			1

	Jabatan	Eselon				Golongan							Tingkat Pendidikan					Jlh
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	IX	V	III	S3	S2	S1	D3	SMA	
	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini				1	1									1			1
	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				1	1							1					1
	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				1	1									1			1
	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar				1	1							1					1
	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar				1	1							1					1
	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar				1	1							1					1
	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama				1	1							1					1
	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama				1	1							1					1
	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama																	
	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				1	1									1			1
	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar																	
	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama				1	1							1					1
	Pelaksana					1	18	1		5	3	10	1	2	20	1	14	46
	Fungsional					8	2	1		4				6	7	2		15

C. Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yaitu :

1. Kurangnya minat Masyarakat untuk menempuh jalur Pendidikan formal dan cenderung memilih jalur Pendidikan keagamaan
2. Masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS)
3. Masih terdapat wilayah dengan keterbatasan sarana dan prasarana Pendidikan terutama di daerah terpencil
4. Belum meratanya kompetensi dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
5. Belum optimalnya kualitas hasil belajar siswa
6. Belum optimalnya kualitas kelembagaan satuan pendidik

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Triwulan II Dinas Pendidikan Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Triwulan II, tugas pokok, fungsi, dasar hukum, struktur organisasi serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja yang pada tahun 2026;

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja organisasi tahun 2026 dan realisasi anggaran Triwulan II tahun 2026 beserta analisisnya;

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Banjar sebagai kontribusi nyata terhadap visi pembangunan daerah yang Maju, Mandiri, dan Agamis. Upaya ini mencakup peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan, sehingga tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dalam akses pendidikan formal maupun nonformal.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar periode 2025-2029 berdasarkan isu-isu strategis, maka untuk itu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Adapun tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yaitu “Meningkatnya Kualitas Pendidikan”, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator	Target	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8.31	Tahun	Angka ini menghitung jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk usia dewasa—biasanya dibatasi pada usia 25 tahun ke atas—di bangku formal pendidikan.
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.14	Tahun	Jumlah tahun sekolah formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas pada masa mendatang

B. SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa di seluruh jenjang pendidikan. Dinas Pendidikan juga menargetkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan melalui

pelatihan, pendampingan, dan pengembangan karier berkelanjutan, serta pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Selain itu, Dinas Pendidikan berupaya memperkuat efektivitas kelembagaan satuan pendidikan agar lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan. Melalui sasaran-sasaran tersebut, diharapkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Banjar meningkat secara menyeluruh, mendukung tercapainya pendidikan yang inklusif, berkarakter, dan berkelanjutan.

Indikator kinerja merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur secara objektif tingkat keberhasilan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberadaan indikator kinerja memberikan arah yang jelas sekaligus menjadi tolok ukur yang tegas dalam menilai apakah suatu program atau kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai hasil sesuai dengan perencanaan. Indikator kinerja yang dirumuskan secara tepat akan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan representatif dalam menggambarkan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dengan penetapan indikator kinerja yang terstruktur sejak awal, kualitas perencanaan akan meningkat secara signifikan, karena mampu menghindari penetapan sasaran yang abstrak, sulit diukur, dan tidak dapat diverifikasi secara objektif. Dengan demikian, indikator kinerja berperan penting dalam memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan bersifat terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mengampu urusan Pendidikan. Berdasar urusan dan program yang diampu Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mendukung pencapaian 5 (lima) misi Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu

Misi ke-1 : *Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas*

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulan II	Satuan	Program	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 5-6 tahun) X 100%	89,47	N/A	Persen	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Rp. 159.063.578.447
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.	(Jumlah anak usia 7-15 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun) X 100%	96,92	N/A	Persen		2. Rp. 204.527.000
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 7-18 tahun) X 100%	65,23	N/A	Persen		3. Rp. 55.444.000

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulan II	Satuan	Program	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta didik di jenjang PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	(Jumlah Siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini) X 100%	86,77	N/A	Persen		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik di jenjang sekolah dasar dibagi jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	(Jumlah Siswa pada Jenjang Sekolah Dasar / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar) X 100%	100	N/A	Persen		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik di jenjang SMP/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.	(Jumlah Siswa pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama) X 100%	100	N/A	Persen		

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulan II	Satuan	Program	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik dan EMIS) dengan populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi populasi (BPS).	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini) x 100%	64,02	N/A	Persen		
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SD sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar) x 100%	92,37	N/A	Persen		
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SMP	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang	74,73	N/A	Persen		

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulan II	Satuan	Program	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama) x 100%					
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Ukuran capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan yang merujuk pada jenis dan mutu pelayanan pendidikan minimal yang berhak diperoleh setiap peserta didik. Nilai yang di pakai adalah Nilai Indeks SPM Bidang Pendidikan yang merupakan nilai puncak dari Raport Pendidikan secara menyeluruh. Nilai ini telah mencakup semua aspek pengukuran kualitas Pendidikan di tiap-tiap satuan Pendidikan di seluruh Kabupaten Banjar.	$\frac{\text{Jumlah Pencapaian Indikator yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Total Indikator yang Ditetapkan}} \times 100\%$	83,76	N/A	Indeks	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Rp. 159.063.578.447 2. Rp. 55.444.000
3	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) dihitung berdasarkan Permen PAN	Komponen penilaian: 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 20%	79,5	N/A	Nilai	1. Program Penunjang Urusan	1. Rp. 505.615.398.638

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulan II	Satuan	Program	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kinerja Perangkat Daerah		dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian diperoleh dari hasil penilaian tim evaluator AKIP atas implementasi SAKIP di perangkat daerah dengan instrumen yang sudah dirumuskan Kementerian PAN dan RB	3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25% Dari masing-masing komponen penilaian terdapat subkomponen dengan bobot penilaian: 1) Sub-komponen keberadaan 20% 2) Sub-komponen kualitas 30% 3) Sub-komponen pemanfaatan 50%				Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tujuan

Adapun realisasi tujuan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Target Indikator Tujuan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8.31	Tahun	N/A	N/A	Data realisasi RLS tersedia setelah publikasi resmi BPS, sehingga realisasi tahun berjalan akan diketahui pada Triwulan IV.
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.14	Tahun	N/A	N/A	Data realisasi HLS tersedia setelah publikasi resmi BPS, sehingga realisasi tahun berjalan akan diketahui pada Triwulan IV.

Pencapaian tujuan peningkatan kualitas pendidikan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dengan target 8,31 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan target 13,14 tahun. Kedua indikator tersebut menggambarkan capaian dan harapan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Pada Triwulan II, realisasi dan capaian belum dapat ditentukan karena data RLS dan HLS tahun berjalan menunggu publikasi resmi BPS. Upaya pencapaian target tetap dilakukan melalui peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta peningkatan kualitas layanan pembelajaran.

2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Sasaran Strategis

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tw. 2	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	5	7	8	9	10
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	N/A	Persen	N/A	0	
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	N/A	Indeks	N/A	0	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	Nilai	N/A	0	

a) **Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan**

Sasaran meningkatnya aksesibilitas pendidikan merupakan salah satu upaya strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam memastikan seluruh masyarakat, khususnya anak usia sekolah, memperoleh kesempatan yang luas untuk mendapatkan layanan pendidikan yang mudah dijangkau, merata, terjangkau, dan berkelanjutan.

Peningkatan aksesibilitas pendidikan diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan pada setiap jenjang, pengurangan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS), serta peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan satuan pendidikan beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Capaian kinerja sasaran ini antara lain ditunjukkan melalui indikator Angka Partisipasi pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan. Indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat keterjangkauan layanan pendidikan serta seberapa besar penduduk usia sekolah yang telah memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

1) **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6**

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi anak pada rentang usia tersebut yang telah mengakses layanan pendidikan pra-sekolah, seperti PAUD atau taman kanak-kanak. Indikator ini memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar, baik dari aspek kognitif, sosial, maupun emosional.

Pada triwulan II, indikator APS usia 5–6 tahun belum dapat dihitung karena data target dan realisasi belum tersedia. Hal ini disebabkan oleh rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga informasi terkait jumlah anak usia 5–6 tahun yang mengikuti pendidikan pra-sekolah belum dapat diperoleh. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0 persen%, yang perlu dipahami bukan sebagai rendahnya tingkat partisipasi, melainkan sebagai konsekuensi dari belum tersedianya data.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini melalui desa/kelurahan, kecamatan, satuan PAUD, posyandu, dan kegiatan masyarakat.
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan satuan PAUD, desa, kecamatan dan kader masyarakat untuk pendataan dan pemetaan anak usia PAUD yang belum terlayani.
- c. Melakukan Koordinasi penguatan kemitraan PAUD dengan melibatkan PKK, Posyandu, pemerintah desa, kader, organisasi masyarakat dan satuan PAUD .

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Adanya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai dasar pembentukan kemampuan dan karakter anak. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan informasi mengenai manfaat mengikuti layanan PAUD serta pentingnya memberikan stimulasi pendidikan sejak usia dini.

- b. Adanya Edukasi Kepada Orang Tua

Edukasi kepada orang tua dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memberikan layanan pendidikan kepada anak sejak usia dini. Orang tua diberikan pemahaman bahwa PAUD tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga berperan dalam mendukung perkembangan anak secara menyeluruh dan mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya.

c. Adanya Penyampaian Informasi terkait Layanan PAUD

Penyampaian informasi mengenai layanan PAUD dilakukan untuk memudahkan masyarakat dan orang tua memperoleh informasi tentang keberadaan satuan PAUD di wilayah tempat tinggalnya. Informasi tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan informasi dan mendorong orang tua untuk mendaftarkan anaknya pada satuan PAUD yang tersedia.

Faktor Penghambat:

a. Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya PAUD

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan baru diperlukan ketika anak memasuki jenjang Sekolah Dasar, sehingga pendidikan pada usia dini belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut mengakibatkan masih terdapat anak usia dini yang belum memperoleh layanan PAUD. Di samping itu, pemahaman masyarakat mengenai manfaat PAUD dalam mendukung perkembangan kemampuan dasar anak, pembentukan karakter, serta kesiapan mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan PAUD yang tersedia.

b. Masih Rendahnya Kesadaran Orang Tua untuk Memasukkan Anak ke Satuan PAUD

Sebagian orang tua belum memahami bahwa pendidikan anak usia dini merupakan tahap penting dalam mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Faktor sosial, ekonomi, serta keterjangkauan layanan pada beberapa wilayah juga menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan layanan PAUD.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan pendekatan langsung/door to door kepada keluarga yang memiliki anak usia PAUD tetapi belum mengikuti layanan

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menjangkau kelompok sasaran yang belum terlayani secara optimal serta mengetahui secara langsung kondisi dan kendala yang dihadapi keluarga. Pendekatan langsung juga dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan anak belum mengikuti layanan PAUD. Informasi yang diperoleh dari keluarga digunakan sebagai bahan untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai, sehingga penanganan tidak hanya

dilakukan melalui sosialisasi secara umum tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.

- b. Mengintegrasikan pendataan melalui desa, kecamatan, Posyandu, kader dan satuan PAUD

Melakukan integrasi dan pemutakhiran data anak usia PAUD melalui koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, Posyandu, kader, dan satuan PAUD untuk mengidentifikasi anak yang belum memperoleh layanan PAUD serta memastikan data sasaran lebih akurat sebagai dasar peningkatan akses dan partisipasi PAUD.

- c. Membuka layanan PAUD yang lebih dekat dengan masyarakat atau mengoptimalkan satuan PAUD yang sudah tersedia

Melakukan pemetaan wilayah yang belum terjangkau layanan PAUD serta mengoptimalkan satuan PAUD yang telah tersedia agar layanan pendidikan anak usia dini lebih mudah dijangkau masyarakat. Upaya dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan kapasitas satuan PAUD, penjangkauan anak usia dini di sekitar wilayah layanan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pengembangan layanan PAUD pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun digunakan untuk mengukur proporsi anak pada rentang usia wajib belajar yang sedang mengakses layanan pendidikan formal, yaitu pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar, karena menggambarkan sejauh mana seluruh anak usia sekolah telah terjangkau oleh sistem pendidikan.

Pada pelaporan triwulan ini, indikator APS usia 7–15 tahun belum dapat dihitung karena data target dan realisasi belum tersedia. Kondisi ini disebabkan oleh rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga informasi mengenai jumlah anak usia 7–15 tahun yang bersekolah belum dapat diperoleh secara resmi. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0%, yang perlu dipahami bukan sebagai

rendahnya tingkat partisipasi, melainkan sebagai konsekuensi dari belum tersedianya data yang valid dan terverifikasi.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi anak usia SD yang belum terdaftar melalui koordinasi dengan sekolah, desa dan kecamatan.
- b. Melakukan monitoring dan koordinasi pemutakhiran data peserta didik pada Dapodik.
- c. Melakukan rekonsiliasi data peserta didik yang pindah masuk dan pindah keluar antarsatuan pendidikan.
- d. Melakukan pemantauan Rapor Pendidikan dan menggunakan data Dapodik serta data sekolah sebagai data pendukung sementara.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Pelaksanaan Sosialisasi SPMB dan Kampanye Wajib Belajar kepada Masyarakat

Melaksanakan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan kampanye wajib belajar kepada masyarakat melalui satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, serta media informasi yang tersedia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penerimaan murid baru, pentingnya pendidikan dasar, serta mendorong orang tua untuk memastikan anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan.

- b. Koordinasi dalam Mengidentifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS)

Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, dan instansi terkait dalam mengidentifikasi dan memverifikasi anak tidak sekolah (ATS), termasuk anak yang belum

pernah bersekolah maupun yang berhenti mengikuti pendidikan. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan penjangkauan dan menentukan langkah intervensi agar anak dapat kembali memperoleh layanan pendidikan.

c. Pencegahan Anak Putus Sekolah melalui Pendampingan dan Pembinaan

Melaksanakan upaya pencegahan anak putus sekolah melalui pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam mengidentifikasi peserta didik yang berisiko putus sekolah. Pendampingan diarahkan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik dan mencari alternatif penyelesaian bersama sekolah dan orang tua agar peserta didik dapat tetap melanjutkan pendidikan.

d. Monitoring dan Pemutakhiran Data Peserta Didik melalui Dapodik

Melaksanakan monitoring dan pemutakhiran data peserta didik melalui aplikasi Dapodik secara berkala dengan berkoordinasi bersama operator satuan pendidikan. Kegiatan dilakukan untuk memastikan data peserta didik, status sekolah, perpindahan peserta didik, serta data anak usia sekolah tercatat secara akurat dan mutakhir sebagai dasar pemantauan dan evaluasi peningkatan akses pendidikan dasar.

Faktor Penghambat:

a. Masih terdapat anak usia 7–15 tahun yang belum bersekolah atau berisiko putus sekolah karena faktor ekonomi dan sosial

Masih terdapat anak usia 7–15 tahun yang belum mengikuti pendidikan atau berisiko putus sekolah yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kondisi keluarga, serta rendahnya dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam upaya meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan dasar secara merata. Oleh karena itu, diperlukan pendataan, penjangkauan, pendampingan, serta koordinasi dengan sekolah, orang tua, pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait untuk mencegah anak putus sekolah dan mendorong anak kembali memperoleh layanan pendidikan.

b. Perpindahan penduduk serta perubahan domisili menyebabkan ketidaksesuaian data anak usia sekolah

Perpindahan penduduk dan perubahan domisili keluarga menyebabkan adanya perubahan status dan lokasi peserta didik sehingga dapat memengaruhi kesesuaian data anak usia sekolah. Perpindahan

peserta didik antarsatuan pendidikan maupun perpindahan keluar dan masuk wilayah Kabupaten Banjar memerlukan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala agar tidak terjadi data ganda, peserta didik yang belum tercatat, maupun ketidaksesuaian antara data sekolah dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

- c. Belum optimalnya pelaporan dan pemutakhiran data peserta didik pada satuan Pendidikan

Pelaporan dan pemutakhiran data peserta didik pada sebagian satuan pendidikan masih perlu dioptimalkan. Perubahan status peserta didik, seperti peserta didik baru, pindah sekolah, lulus, atau tidak melanjutkan pendidikan, perlu segera diperbarui agar data yang digunakan dalam pemantauan akses pendidikan tetap akurat dan mutakhir. Kondisi ini memerlukan peningkatan koordinasi dan monitoring terhadap satuan pendidikan serta penguatan peran operator dalam melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala.

- d. Akses pendidikan di beberapa wilayah masih memerlukan perhatian, terutama bagi peserta didik yang berada di daerah dengan keterbatasan sarana transportasi

Akses terhadap layanan pendidikan dasar di beberapa wilayah masih memerlukan perhatian, khususnya bagi peserta didik yang tinggal di daerah dengan keterbatasan sarana transportasi dan kondisi geografis tertentu. Jarak antara tempat tinggal dengan satuan pendidikan serta keterbatasan akses transportasi dapat menjadi kendala bagi peserta didik untuk mengikuti pendidikan secara optimal. Kondisi tersebut memerlukan pemetaan wilayah yang memiliki keterbatasan akses serta koordinasi dengan pemerintah desa, satuan pendidikan dan pihak terkait untuk mencari alternatif solusi guna memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dasar.

Solusi Alternatif:

- a. Melakukan pendataan dan penjangkauan langsung terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau berisiko putus sekolah, memberikan pendampingan kepada anak dan orang tua, serta berkoordinasi dengan sekolah, pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait untuk memfasilitasi anak agar tetap atau kembali memperoleh layanan pendidikan.
- b. Menerbitkan surat edaran tentang penelusuran dan penanganan Anak Tidak Sekolah dengan melibatkan pengawas, penilik dan kepala satuan

Pendidikan untuk melakukan penelusuran dan verifikasi keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan mengajak, menyalurkan dan mendampingi ATS untuk kembali bersekolah melalui jalur Pendidikan formal dan non formal

- c. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data anak usia sekolah secara berkala antara Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan dan data kependudukan untuk memastikan status dan domisili peserta didik sesuai dengan kondisi sebenarnya serta mencegah terjadinya data ganda atau anak yang belum tercatat.
- d. Meningkatkan monitoring dan pembinaan kepada satuan pendidikan serta operator sekolah dalam melakukan verifikasi dan pemutakhiran data peserta didik secara berkala, terutama terhadap data peserta didik baru, pindah, lulus, dan tidak melanjutkan pendidikan.
- e. Melakukan pemetaan wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan mengidentifikasi peserta didik yang terdampak, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah desa, satuan pendidikan dan pihak terkait untuk menyediakan alternatif akses menuju layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun jalur kesetaraan digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan anak usia sekolah dalam pendidikan nonformal, seperti program Paket A, Paket B, dan Paket C. Jalur kesetaraan ini berfungsi sebagai alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, baik karena faktor ekonomi, geografis, sosial, maupun sebab lainnya seperti putus sekolah.

Pada pelaporan ini, indikator APS usia 7–18 tahun kesetaraan belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Hal ini disebabkan oleh rapor pendidikan sebagai sumber utama data belum dirilis, sehingga informasi mengenai jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan belum dapat diperoleh secara resmi. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, melainkan menunjukkan belum tersedianya data pendukung.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendataan dan pemetaan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7–18 tahun bersama pemerintah desa/kelurahan, PKBM, SKB, dan satuan pendidikan.
- b. Melaksanakan sosialisasi pendidikan kesetaraan kepada masyarakat, orang tua, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.
- c. Melaksanakan penjangkauan ATS melalui kunjungan rumah (home visit) untuk memberikan motivasi dan informasi mengenai pendidikan kesetaraan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi data calon warga belajar untuk memastikan ATS yang teridentifikasi dapat diarahkan ke satuan pendidikan kesetaraan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan PKBM/SKB dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran.
- f. Melakukan pemantauan kehadiran dan keberlanjutan warga belajar, termasuk tindak lanjut terhadap warga belajar yang berisiko putus belajar.
- g. Melaksanakan pemutakhiran data warga belajar melalui Dapodik Pendidikan Kesetaraan secara berkala.
- h. Mengembangkan pembelajaran yang fleksibel untuk mengakomodasi warga belajar yang memiliki mobilitas tinggi atau kendala mengikuti jadwal pembelajaran reguler.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Pelaksanaan sosialisasi program pendidikan kesetaraan kepada masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan
 Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai alternatif dalam

memperoleh layanan pendidikan bagi anak dan masyarakat yang belum atau tidak dapat mengikuti pendidikan formal.

- b. Koordinasi dengan PKBM, SKB, pemerintah desa, dan satuan pendidikan dalam menjangkau Anak Tidak Sekolah (ATS)

Koordinasi dilakukan untuk mengidentifikasi, mendata, dan menjangkau ATS usia 7–18 tahun yang belum memperoleh layanan pendidikan. Melalui koordinasi tersebut, ATS diarahkan untuk memperoleh layanan pendidikan kesetaraan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

- c. Pembinaan kepada penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan mutu layanan pembelajaran

Pembinaan dilakukan melalui pendampingan, monitoring, dan pemberian arahan kepada PKBM dan SKB dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif, sesuai ketentuan, serta mampu memenuhi kebutuhan warga belajar.

- d. Pemutakhiran data warga belajar melalui Dapodik Pendidikan Kesetaraan secara berkala

Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan data warga belajar tersaji secara lengkap, akurat, dan terkini. Pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan program, pemantauan perkembangan warga belajar, serta pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan kesetaraan.

Faktor Penghambat:

- a. Masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7–18 tahun yang belum berminat mengikuti program pendidikan kesetaraan.

Kondisi ini disebabkan oleh masih adanya ATS yang belum memiliki motivasi dan pemahaman yang cukup mengenai manfaat pendidikan kesetaraan. Selain itu, faktor lingkungan, kondisi keluarga, serta aktivitas lain yang dilakukan anak turut memengaruhi minat untuk kembali mengikuti pendidikan.

- b. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai alternatif penyelesaian pendidikan formal masih rendah.

Sebagian masyarakat belum memahami bahwa pendidikan kesetaraan dapat menjadi alternatif untuk memperoleh layanan pendidikan dan menyelesaikan jenjang pendidikan bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Kondisi tersebut berdampak pada

masih rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan kesetaraan.

- c. Mobilitas warga belajar yang cukup tinggi menyebabkan keberlangsungan mengikuti pembelajaran belum optimal.

Sebagian warga belajar memiliki aktivitas dan kondisi yang menyebabkan mereka berpindah tempat atau tidak dapat mengikuti jadwal pembelajaran secara rutin. Hal tersebut berdampak pada tingkat kehadiran, keterlibatan dalam proses pembelajaran, serta keberlanjutan warga belajar dalam menyelesaikan program pendidikan kesetaraan.

- d. Pendataan dan penjangkauan calon warga belajar di beberapa wilayah belum optimal.

Masih terdapat calon warga belajar, khususnya ATS usia 7–18 tahun, yang belum teridentifikasi atau belum terjangkau oleh layanan pendidikan kesetaraan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan koordinasi dalam pendataan serta belum optimalnya sinergi antara satuan pendidikan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam melakukan penjangkauan calon warga belajar.

Solusi Alternatif:

- a. Meningkatkan minat ATS usia 7–18 tahun terhadap pendidikan kesetaraan melalui pendekatan persuasif, pendampingan, dan pemberian motivasi kepada ATS serta orang tua. Penjangkauan dilakukan secara langsung melalui kunjungan rumah dan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta penyelenggara pendidikan kesetaraan.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesetaraan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan pertemuan masyarakat, pemerintah desa, media sosial, serta media informasi lainnya. Materi sosialisasi menekankan manfaat pendidikan kesetaraan bagi keberlanjutan pendidikan dan masa depan warga belajar.
- c. Meningkatkan fleksibilitas dan keberlanjutan pembelajaran bagi warga belajar dengan menyesuaikan jadwal dan metode pembelajaran berdasarkan kondisi serta mobilitas warga belajar. Selain itu, dilakukan pemantauan kehadiran dan komunikasi secara berkala untuk mencegah warga belajar berhenti mengikuti pembelajaran.
- d. Memperkuat pendataan dan penjangkauan calon warga belajar melalui koordinasi dan sinergi antara PKBM, SKB, pemerintah desa, satuan

pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendataan dilakukan secara berkala melalui pemetaan ATS, verifikasi lapangan, serta pemutakhiran data agar seluruh calon warga belajar yang memenuhi kriteria dapat teridentifikasi dan memperoleh layanan pendidikan kesetaraan.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

4) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi anak dalam layanan pendidikan anak usia dini secara umum. APK dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh peserta didik yang terdaftar di satuan PAUD (tanpa melihat apakah usianya sesuai atau tidak) dengan total populasi anak usia PAUD di suatu wilayah. Oleh karena itu, indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang cakupan layanan pendidikan anak usia dini, termasuk kemungkinan adanya anak di luar usia ideal yang juga terlayani.

Pada periode pelaporan ini, indikator APK PAUD belum dapat dihitung karena data target dan realisasi belum tersedia. Kondisi ini terjadi karena rapor pendidikan sebagai sumber utama data belum dirilis, sehingga informasi mengenai jumlah peserta didik PAUD maupun jumlah populasi usia PAUD belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, melainkan menunjukkan belum tersedianya data pendukung.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan edukasi pentingnya PAUD kepada masyarakat dan orang tua.
- b. Pendataan dan pemetaan anak usia dini yang belum mengikuti layanan PAUD.
- c. Penjangkauan anak usia dini melalui kunjungan rumah (home visit).

- d. Pelaksanaan kegiatan parenting bagi orang tua/wali peserta didik dan calon peserta didik PAUD.
- e. Koordinasi dengan pemerintah desa, Posyandu, PKK, kader, dan satuan PAUD dalam meningkatkan partisipasi anak usia dini.
- f. Publikasi dan kampanye pentingnya PAUD melalui media sosial, media informasi desa, dan kegiatan kemasyarakatan.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Adanya dukungan dan keterlibatan orang tua dalam meningkatkan partisipasi anak pada layanan PAUD, melalui pemberian kesempatan kepada anak usia dini untuk mengikuti pendidikan pada satuan PAUD sesuai dengan usia dan kebutuhannya.
- b. Adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, satuan PAUD, kader, serta masyarakat dalam mendorong peningkatan akses dan partisipasi anak usia dini pada layanan pendidikan.
- c. Tersedianya satuan PAUD yang dapat memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini, sehingga mendukung perluasan akses dan memberikan pilihan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat.
- d. Adanya kegiatan pendataan dan penjangkauan anak usia dini yang belum mengikuti layanan PAUD, sebagai upaya untuk mengidentifikasi sasaran dan mendorong peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan anak usia dini.

Faktor Penghambat:

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya PAUD
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami secara optimal pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai tahapan pendidikan yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemahaman mengenai manfaat PAUD dalam aspek kognitif, bahasa, sosial-emosional, fisik-motorik, serta kesiapan

anak memasuki jenjang pendidikan dasar masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan PAUD.

- b. Masih rendahnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anak ke satuan PAUD

Sebagian orang tua masih belum memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti layanan PAUD. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh persepsi bahwa pendidikan anak usia dini belum menjadi kebutuhan utama atau anak dapat langsung mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Rendahnya kesadaran tersebut berdampak pada belum optimalnya partisipasi anak usia dini dalam layanan PAUD dan pada akhirnya memengaruhi pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

Solusi Alternatif:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya PAUD, dilakukan penguatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai manfaat pendidikan anak usia dini bagi pertumbuhan, perkembangan, pembentukan karakter, serta kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah desa, kader, tokoh masyarakat, satuan PAUD, dan pemangku kepentingan terkait serta memanfaatkan berbagai media informasi yang mudah diakses masyarakat.
- b. Untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam mengikutsertakan anak pada satuan PAUD, dilakukan pendekatan dan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya stimulasi dan pembelajaran pada usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan parenting, penyampaian informasi pada kegiatan kemasyarakatan, kunjungan atau penjangkauan kepada keluarga yang memiliki anak usia dini, serta pemberian informasi mengenai satuan PAUD yang tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

5) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan peserta didik pada jenjang

pendidikan dasar secara umum. APK dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), termasuk mereka yang berusia di bawah atau di atas usia sekolah ideal, dengan total populasi anak usia sekolah dasar di suatu wilayah. Dengan demikian, indikator ini memberikan gambaran luas mengenai cakupan layanan pendidikan dasar, tanpa memperhatikan kesesuaian usia peserta didik.

Pada triwulan ini, indikator APK Sekolah Dasar belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Hal ini terjadi karena rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga data mengenai jumlah siswa SD maupun jumlah populasi usia sekolah dasar belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator tercatat sebesar 0%, yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, melainkan menunjukkan belum tersedianya data yang dibutuhkan untuk perhitungan.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemantauan pendataan dan pemetaan anak usia sekolah dasar yang belum terdaftar atau belum memperoleh layanan pendidikan sebagai upaya memastikan seluruh anak usia sekolah dasar teridentifikasi dan menjadi sasaran layanan pendidikan.
- b. Melaksanakan penjangkauan dan fasilitasi terhadap anak usia sekolah dasar yang belum memperoleh layanan pendidikan dengan melibatkan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait agar anak dapat memperoleh akses terhadap pendidikan dasar.
- c. Melaksanakan koordinasi dan monitoring pemutakhiran data peserta didik melalui Dapodik bersama satuan pendidikan untuk memastikan data peserta didik tersaji secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi terkini.
- d. Melaksanakan pemantauan perkembangan data Angka Partisipasi Kasar (APK) secara berkala berdasarkan data pendidikan yang tersedia

sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar.

- e. Melaksanakan pemantauan pemutakhiran analisis data pendidikan setelah Rapor Pendidikan 2026 tersedia, dengan melakukan penyesuaian dan penguatan analisis berdasarkan data terbaru untuk mendukung evaluasi serta perencanaan tindak lanjut peningkatan akses pendidikan dasar.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Dukungan dalam pelaksanaan program wajib belajar dan peningkatan akses pendidikan dasar menjadi faktor pendukung dalam pencapaian indikator APK Sekolah Dasar. Dukungan tersebut mendorong terlaksananya berbagai upaya perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan, sehingga anak usia sekolah dasar memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya.
- b. Koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dan pemerintah desa dalam pendataan anak usia sekolah mendukung tersedianya data yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi anak usia sekolah. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka mengidentifikasi anak yang belum terdaftar atau belum memperoleh layanan pendidikan serta mendukung penjangkauan dan fasilitasi agar dapat mengakses pendidikan dasar.
- c. Pemanfaatan aplikasi Dapodik sebagai sumber data utama dalam pemantauan peserta didik mendukung proses pengelolaan, pemutakhiran, dan pemantauan data pendidikan secara berkala. Ketersediaan data melalui Dapodik menjadi salah satu dasar dalam melakukan analisis perkembangan peserta didik dan mendukung pemantauan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar.

Faktor Penghambat:

- a. Masih terdapat anak usia sekolah dasar yang belum terdata atau belum terdaftar pada satuan pendidikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendataan dan penjangkauan anak usia sekolah dasar di beberapa wilayah masih perlu dioptimalkan. Masih terdapat kemungkinan adanya anak yang belum teridentifikasi dalam data pendidikan atau belum memperoleh layanan pendidikan dasar, sehingga dapat memengaruhi pencapaian dan pengukuran Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar.

- b. Proses pemutakhiran data peserta didik pada Dapodik masih berlangsung sehingga data belum final.

Kondisi tersebut menyebabkan data yang tersedia pada periode pelaporan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi peserta didik secara terkini. Pemutakhiran data masih memerlukan proses verifikasi dan validasi oleh satuan pendidikan untuk memastikan kelengkapan, ketepatan, dan kesesuaian data.

- c. Mobilitas penduduk dan perpindahan peserta didik antarsatuan pendidikan memengaruhi validitas data APK.

Perpindahan peserta didik, baik masuk maupun keluar satuan pendidikan, serta mobilitas penduduk antardaerah menyebabkan perubahan pada data peserta didik. Kondisi tersebut memerlukan pemantauan, koordinasi, dan sinkronisasi secara berkala agar perubahan status peserta didik dapat tercatat secara tepat dan tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam penghitungan APK.

- d. Data Rapor Pendidikan Tahun 2026 belum dirilis.

Belum tersedianya data Rapor Pendidikan Tahun 2026 menyebabkan analisis dan evaluasi capaian indikator pada periode berjalan belum dapat didukung secara menyeluruh oleh data tersebut. Oleh karena itu, pemantauan sementara masih menggunakan data pendidikan yang tersedia, khususnya data Dapodik, sampai dengan data Rapor Pendidikan Tahun 2026 diterbitkan.

Solusi Alternatif:

- a. Memperkuat pendataan, pemetaan, verifikasi, dan penjangkauan anak usia sekolah dasar melalui koordinasi dengan pemerintah desa, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait. Anak yang teridentifikasi belum memperoleh layanan pendidikan selanjutnya difasilitasi dan diarahkan untuk mendapatkan akses pendidikan dasar.

- b. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pemutakhiran data Dapodik dengan satuan pendidikan melalui verifikasi dan validasi data peserta didik secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang tercatat lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi riil peserta didik.
- c. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data peserta didik antar satuan pendidikan, khususnya terhadap peserta didik yang masuk, pindah, maupun keluar. Pemantauan perubahan status peserta didik dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi dan validitas data APK.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan data pendidikan yang tersedia, khususnya Dapodik, sebagai dasar pemantauan dan analisis sementara. Setelah data Rapor Pendidikan Tahun 2026 tersedia, dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian analisis sebagai bahan evaluasi capaian serta penyusunan tindak lanjut peningkatan akses pendidikan dasar.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

6) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah pertama secara keseluruhan. APK dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh siswa yang terdaftar di SMP, baik yang berada pada usia sekolah ideal maupun di luar usia tersebut, dengan total populasi penduduk usia SMP di suatu wilayah. Dengan demikian, indikator ini memberikan gambaran mengenai cakupan layanan pendidikan menengah pertama secara luas.

Pada pelaporan ini, indikator APK SMP belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Hal ini disebabkan oleh rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga data mengenai jumlah peserta didik SMP serta jumlah penduduk usia sekolah menengah pertama belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator tercatat sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, melainkan menunjukkan belum tersedianya data yang dibutuhkan untuk perhitungan.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga

Kependidikan. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam rangka pemutakhiran data peserta didik melalui Dapodik, guna mendukung ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi terkini.
- b. Telah dilaksanakan koordinasi dan monitoring proses validasi serta sinkronisasi data peserta didik dengan data kependudukan bersama pihak terkait untuk meningkatkan kesesuaian dan akurasi data sebagai dasar pemantauan akses pendidikan jenjang SMP.
- c. Telah dilakukan monitoring terhadap satuan pendidikan yang belum menyelesaikan pemutakhiran data secara lengkap dan tepat waktu, serta memberikan arahan dan pendampingan untuk mempercepat penyelesaian pemutakhiran data.
- d. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap data peserta didik yang belum sesuai atau masih memerlukan perbaikan melalui koordinasi dengan satuan pendidikan dan operator Dapodik untuk memastikan data diperbaiki dan diperbarui sesuai kondisi sebenarnya.
- e. Telah dilaksanakan pemantauan perkembangan data peserta didik secara berkala sebagai bahan persiapan penghitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama serta sebagai dasar dalam mengevaluasi perkembangan akses pendidikan jenjang SMP.
- f. Telah dilaksanakan koordinasi dengan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP, termasuk upaya penjangkauan anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan.
- g. Telah dilakukan monitoring pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan sesuai ketentuan serta mendukung terpenuhinya akses layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah pada jenjang SMP.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Adanya pembinaan dan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait pemutakhiran data Dapodik menjadi faktor pendukung dalam penyediaan data peserta didik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Kegiatan pembinaan dan pendampingan membantu satuan pendidikan dalam melakukan pemutakhiran serta perbaikan data sesuai dengan kondisi riil, sehingga mendukung proses pemantauan akses dan partisipasi pendidikan jenjang SMP.
- b. Adanya koordinasi dengan sekolah dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan akses pendidikan mendukung terjalannya sinergi dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan akses pendidikan. Koordinasi tersebut menjadi dasar dalam mendorong terpenuhinya layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah serta mendukung keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP.
- c. Adanya monitoring pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan menjadi faktor pendukung dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses penerimaan murid berjalan sesuai ketentuan serta mengidentifikasi anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan sehingga dapat dilakukan tindak lanjut bersama satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait.

Faktor Penghambat:

- a. Data APK SMP belum dapat dihitung pada Triwulan II karena proses pendataan peserta didik masih berlangsung.

Kondisi ini menyebabkan data yang diperlukan sebagai dasar penghitungan APK belum sepenuhnya tersedia dan masih memerlukan proses pengumpulan, pemutakhiran, serta verifikasi dari satuan pendidikan. Oleh karena itu, capaian APK SMP pada Triwulan II belum dapat disajikan secara final.

- b. Masih menunggu proses validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta sinkronisasi dengan data kependudukan.

Proses validasi dan sinkronisasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian data peserta didik dengan data kependudukan sebagai dasar penyediaan data yang akurat. Selama proses tersebut belum

selesai, data yang tersedia masih perlu dilakukan verifikasi dan belum dapat sepenuhnya digunakan sebagai dasar penghitungan APK SMP.

- c. Terdapat satuan pendidikan yang belum melakukan pemutakhiran data secara lengkap dan tepat waktu.

Kondisi tersebut menyebabkan data peserta didik yang tersedia belum sepenuhnya menggambarkan kondisi terkini pada seluruh satuan pendidikan. Keterlambatan pemutakhiran juga berdampak pada kelengkapan dan akurasi data yang diperlukan dalam proses validasi serta penghitungan APK SMP.

Solusi Alternatif:

- a. Mengoptimalkan percepatan pendataan, pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data peserta didik SMP melalui koordinasi dan monitoring secara berkala dengan satuan pendidikan, sehingga data yang diperlukan untuk penghitungan APK dapat tersedia secara lengkap dan tepat waktu.
- b. Memperkuat koordinasi dengan satuan pendidikan dan instansi terkait dalam proses validasi serta sinkronisasi data Dapodik dengan data kependudukan, termasuk melakukan identifikasi dan tindak lanjut terhadap data yang belum sesuai agar diperoleh data yang akurat sebagai dasar penghitungan APK SMP.
- c. Meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan monitoring kepada satuan pendidikan, khususnya dalam pemutakhiran data Dapodik, serta melakukan tindak lanjut terhadap satuan pendidikan yang belum menyelesaikan pemutakhiran data agar seluruh data peserta didik dapat diperbarui secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

7) Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD digunakan untuk mengukur proporsi anak pada usia PAUD yang benar-benar sedang bersekolah di jenjang yang sesuai, yaitu layanan pendidikan anak usia dini. Berbeda dengan APK yang menghitung seluruh peserta didik tanpa memperhatikan kesesuaian usia, APM lebih spesifik karena hanya menghitung anak yang *berusia sesuai dengan jenjang PAUD. Oleh karena itu, indikator ini sangat penting untuk menilai ketepatan akses pendidikan sejak usia dini.

Pada periode pelaporan ini, indikator APM PAUD belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Hal ini terjadi

karena rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga informasi terkait jumlah anak usia PAUD yang benar-benar bersekolah pada jenjang PAUD belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, melainkan menunjukkan belum tersedianya data yang dibutuhkan untuk perhitungan.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya PAUD kepada masyarakat dan orang tua.
- b. Melaksanakan pendataan dan penjangkauan anak usia dini yang belum mengikuti layanan PAUD.
- c. Melaksanakan kegiatan parenting bagi orang tua/wali anak usia dini.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa, kader, dan satuan PAUD dalam meningkatkan partisipasi anak pada layanan PAUD.
- e. Melaksanakan publikasi dan penyebarluasan informasi mengenai manfaat dan layanan PAUD kepada masyarakat.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai dasar dalam mempersiapkan anak mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya.
- b. Dorongan partisipasi orang tua dalam mengikutsertakan anak pada satuan PAUD melalui penyampaian informasi mengenai manfaat dan layanan pendidikan anak usia dini yang tersedia di wilayah masing-masing.

- c. Terbangunnya dukungan masyarakat dan orang tua terhadap program PAUD melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga dapat mendukung peningkatan akses dan partisipasi anak dalam layanan pendidikan anak usia dini.

Faktor Penghambat:

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya PAUD.

Pada Triwulan II, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara optimal pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai tahapan pendidikan yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemahaman mengenai manfaat PAUD sebagai dasar pembentukan kemampuan, karakter, dan kesiapan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya partisipasi anak dalam layanan PAUD.

- b. Masih rendahnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anak ke satuan PAUD.

Pada Triwulan II, masih terdapat orang tua yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya mengikutsertakan anak pada satuan PAUD. Sebagian orang tua masih menganggap pendidikan anak usia dini belum menjadi kebutuhan utama sebelum memasuki pendidikan dasar. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya partisipasi anak usia dini dalam memperoleh layanan PAUD dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini.

Solusi Alternatif:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya PAUD melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai manfaat pendidikan anak usia dini dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, pembentukan karakter, serta kesiapan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
- b. Meningkatkan kesadaran orang tua untuk mengikutsertakan anak pada satuan PAUD melalui kegiatan edukasi dan parenting, penyampaian informasi mengenai manfaat PAUD, serta penjangkauan kepada keluarga yang memiliki anak usia dini yang belum mengikuti layanan PAUD.

- c. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, satuan PAUD, kader Posyandu, PKK, dan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan pendataan dan penjangkauan anak usia dini yang belum memperoleh layanan PAUD.
- d. Mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai layanan PAUD melalui kegiatan masyarakat, media sosial, media informasi desa, dan berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan orang tua.
- e. Mendorong peningkatan partisipasi anak dalam layanan PAUD dengan memberikan informasi mengenai ketersediaan satuan PAUD dan memfasilitasi orang tua dalam memilih serta mengakses layanan PAUD yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

8) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar digunakan untuk mengukur proporsi anak pada usia sekolah dasar yang benar-benar bersekolah pada jenjang yang sesuai, yaitu Sekolah Dasar (SD). Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menghitung seluruh peserta didik tanpa memperhatikan kesesuaian usia, APM lebih fokus pada ketepatan usia, sehingga indikator ini penting untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dasar dalam menampung anak sesuai kelompok usia idealnya.

Pada periode pelaporan ini, indikator APM Sekolah Dasar belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Hal ini disebabkan oleh rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga informasi mengenai jumlah anak usia SD yang sedang bersekolah di jenjang SD belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, melainkan menunjukkan belum tersedianya data yang diperlukan untuk perhitungan.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga

Kependidikan. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemantauan pendataan, pemetaan, verifikasi, dan validasi anak usia 7–12 tahun yang belum bersekolah bersama satuan pendidikan dan pemerintah desa/kelurahan.
- b. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, penjangkauan, dan fasilitasi kepada orang tua serta anak usia sekolah dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan dasar tepat usia.
- c. Melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan monitoring satuan pendidikan dalam pemutakhiran data peserta didik melalui Dapodik serta melakukan tindak lanjut terhadap data yang belum sesuai.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemerataan akses pendidikan, termasuk monitoring SPMB dan penjangkauan anak di wilayah dengan keterbatasan akses.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan data peserta didik dan partisipasi anak usia sekolah sebagai bahan pengukuran serta peningkatan capaian APM Sekolah Dasar.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Pelaksanaan sosialisasi Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar. Sosialisasi memberikan informasi kepada masyarakat dan orang tua mengenai mekanisme, persyaratan, serta akses penerimaan murid baru sehingga dapat mendorong anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar sesuai kelompok usianya.
- b. Koordinasi dengan satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, dan instansi terkait mendukung proses penjangkauan dan identifikasi anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan. Sinergi antar pihak membantu dalam memperoleh informasi dan data anak usia sekolah serta mendorong tindak lanjut agar anak dapat memperoleh akses pendidikan dasar.

- c. Monitoring dan pendampingan kepada sekolah dalam upaya pencegahan anak putus sekolah mendukung keberlangsungan pendidikan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi peserta didik yang berisiko putus sekolah, mengetahui faktor penyebabnya, serta mendorong satuan pendidikan melakukan langkah penanganan dan pendampingan secara tepat.
- d. Pemutakhiran data peserta didik melalui Dapodik menjadi faktor pendukung dalam penyediaan data pendidikan yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan program, pemantauan perkembangan peserta didik, serta pengukuran indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar.

Faktor Penghambat:

- a. Masih terdapat anak usia 7–12 tahun yang belum bersekolah sesuai kelompok usianya karena faktor sosial, ekonomi, dan perpindahan domisili.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan dasar sesuai usia. Faktor kondisi sosial dan ekonomi keluarga serta mobilitas atau perpindahan domisili menyebabkan sebagian anak belum terjangkau atau belum melanjutkan pendidikan secara tepat usia.

- b. Kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan dasar tepat usia masih perlu ditingkatkan.

Masih terdapat orang tua yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan dasar bagi perkembangan dan masa depan anak. Kondisi ini dapat memengaruhi keputusan orang tua dalam menyekolahkan anak sesuai dengan kelompok usia serta keberlanjutan pendidikan anak.

- c. Pemutakhiran data peserta didik dan data anak usia sekolah belum sepenuhnya optimal.

Kondisi ini disebabkan masih terdapat data yang perlu dilakukan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Data yang belum sepenuhnya mutakhir dapat memengaruhi ketepatan dalam mengidentifikasi anak usia sekolah serta proses perencanaan dan pengukuran capaian indikator APM Sekolah Dasar.

- d. Masih terdapat wilayah dengan akses pendidikan yang memerlukan perhatian, terutama bagi peserta didik di daerah terpencil.

Keterbatasan akses dan kondisi geografis di beberapa wilayah menjadi tantangan dalam memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan dasar secara optimal. Kondisi tersebut memerlukan upaya penjangkauan, koordinasi, dan penguatan layanan pendidikan agar pemerataan akses pendidikan dapat terus ditingkatkan.

Solusi Alternatif:

- a. Memperkuat pendataan, pemetaan, penjangkauan, dan fasilitasi anak usia 7–12 tahun yang belum bersekolah melalui koordinasi dengan satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, dan instansi terkait. Selain itu, dilakukan pendekatan kepada orang tua untuk mendorong keberlanjutan pendidikan anak serta memfasilitasi anak agar memperoleh layanan pendidikan dasar sesuai kelompok usianya.
- b. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar tepat usia, manfaat pendidikan bagi perkembangan dan masa depan anak, serta dampak yang ditimbulkan apabila anak tidak memperoleh pendidikan secara berkelanjutan.
- c. Meningkatkan pembinaan, pendampingan, monitoring, serta verifikasi dan validasi data peserta didik dan anak usia sekolah secara berkala. Pemutakhiran dilakukan melalui Dapodik dan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan serta satuan pendidikan untuk memastikan data lengkap, akurat, dan sesuai kondisi riil.
- d. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam melakukan pemetaan wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan serta meningkatkan penjangkauan terhadap anak usia sekolah di wilayah tersebut. Upaya juga diarahkan pada fasilitasi dan pemerataan layanan pendidikan agar anak di daerah terpencil tetap memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dasar.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

9) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) digunakan untuk mengukur proporsi anak pada usia sekolah menengah pertama yang benar-benar bersekolah di jenjang SMP sesuai dengan kelompok usianya. Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencakup seluruh peserta didik tanpa memperhatikan

kesesuaian usia, APM lebih menekankan pada ketepatan usia dalam mengakses pendidikan, sehingga indikator ini penting untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dalam menampung peserta didik sesuai jenjang yang semestinya.

Pada periode pelaporan ini, indikator APM SMP belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Kondisi ini terjadi karena rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga informasi mengenai jumlah anak usia SMP yang bersekolah pada jenjang SMP belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator tercatat sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, melainkan menunjukkan belum tersedianya data yang diperlukan untuk perhitungan.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penjangkauan anak usia 13–15 tahun yang belum melanjutkan pendidikan dengan melibatkan SD, SMP, pemerintah desa/kelurahan, dan instansi terkait sebagai upaya memastikan keberlanjutan pendidikan dari jenjang SD ke SMP.
- b. Memperkuat pelaksanaan sosialisasi SPMB dan kampanye wajib belajar kepada masyarakat dan orang tua sebagai strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
- c. Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap peserta didik yang berpotensi putus sekolah serta mendorong satuan pendidikan untuk melakukan intervensi dan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi peserta didik.
- d. Melaksanakan supervisi dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam pemutakhiran Dapodik guna memastikan data peserta didik dan data anak usia sekolah tersedia secara lengkap, akurat, dan mutakhir.
- e. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah desa/kelurahan serta pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi anak usia sekolah

yang belum memperoleh layanan pendidikan dan memastikan adanya tindak lanjut penanganannya.

- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan akses dan partisipasi pendidikan jenjang SMP sebagai bahan pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pengendalian pencapaian indikator APM SMP.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Terlaksananya sosialisasi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan kampanye wajib belajar kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah.
- b. Terjalinnya koordinasi dan sinergi antara satuan pendidikan jenjang SD dan SMP, pemerintah desa/kelurahan, serta instansi terkait dalam menjaring lulusan SD agar melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau sederajat.
- c. Terlaksananya monitoring dan pendampingan terhadap peserta didik yang berpotensi putus sekolah sebagai upaya deteksi dini, pencegahan, dan pengendalian angka putus sekolah serta menjaga keberlanjutan pendidikan peserta didik.
- d. Terlaksananya pemutakhiran data peserta didik melalui Dapodik secara berkala sebagai dukungan terhadap ketersediaan data yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengukuran indikator APM SMP.

Faktor Penghambat:

- a. Masih terdapat anak usia 13–15 tahun yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau sederajat karena faktor ekonomi, sosial, maupun kondisi keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kelompok anak usia sekolah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan pendidikan menengah pertama, sehingga diperlukan penguatan penjangkauan,

fasilitasi, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan pendidikan.

- b. Masih terdapat peserta didik yang berisiko putus sekolah akibat perpindahan domisili, bekerja membantu orang tua, atau alasan lainnya.

Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan peserta didik dan memerlukan penguatan deteksi dini, monitoring, serta pendampingan oleh satuan pendidikan bersama orang tua dan pemangku kepentingan terkait.

- c. Kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya penyelesaian pendidikan dasar sembilan tahun masih perlu ditingkatkan.

Masih terdapat orang tua yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keberlanjutan pendidikan anak sampai menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan keluarga dalam mempertahankan anak untuk tetap mengikuti pendidikan pada jenjang SMP atau sederajat.

- d. Pemutakhiran data peserta didik dan data anak usia sekolah pada Dapodik masih memerlukan penyempurnaan.

Masih diperlukan peningkatan kelengkapan, ketepatan, dan kesesuaian data melalui proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran secara berkala. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian karena kualitas data sangat mendukung perencanaan, pengendalian, serta pengukuran capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP.

Solusi Alternatif:

- a. Memperkuat penjangkauan dan fasilitasi anak usia 13–15 tahun yang belum melanjutkan pendidikan melalui pendataan, verifikasi, dan pemetaan anak usia sekolah serta penguatan koordinasi dengan SD, SMP, pemerintah desa/kelurahan, dan instansi terkait. Upaya diarahkan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan memastikan anak memperoleh akses pendidikan sesuai jenjang dan usianya.
- b. Memperkuat sistem pencegahan dan penanganan anak berisiko putus sekolah melalui deteksi dini, monitoring, pendampingan, dan tindak lanjut secara terpadu bersama satuan pendidikan, orang tua, pemerintah desa/kelurahan, serta pemangku kepentingan terkait. Bagi peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau kendala keluarga, dilakukan fasilitasi agar keberlanjutan pendidikannya tetap terjaga.

- c. Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian pendidikan dasar sembilan tahun melalui sosialisasi, edukasi, kampanye wajib belajar, dan penguatan peran pemerintah desa/kelurahan serta satuan pendidikan dalam mendorong keberlanjutan pendidikan anak sampai jenjang SMP atau sederajat.
- d. Memperkuat tata kelola dan kualitas data pendidikan melalui optimalisasi pemutakhiran Dapodik dengan meningkatkan pembinaan, pendampingan, monitoring, serta verifikasi dan validasi data secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan data peserta didik dan anak usia sekolah lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, serta pengukuran capaian APM SMP.

2. Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan merupakan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam rangka memastikan terpenuhinya layanan dasar pendidikan yang bermutu, merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banjar sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui penguatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, serta perbaikan tata kelola dan kualitas data pendidikan.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kabupaten Banjar yang sebelumnya telah menempatkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan sebagai bagian dari strategi pencapaian SPM bidang pendidikan. Sasaran kinerja ini memiliki indikator Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan layanan dasar pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana satuan pendidikan dan pemerintah daerah telah memenuhi standar minimal layanan pendidikan, yang mencakup berbagai aspek seperti ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, proses pembelajaran, serta dukungan manajemen pendidikan.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan diukur melalui indikator Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Indeks SPM digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memenuhi penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar pendidikan. Pengukuran tersebut menjadi instrumen untuk mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas intervensi dan tindak lanjut peningkatan mutu layanan.

Pada periode Triwulan II, indikator ini memiliki target N/A dan realisasi N/A, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja. Kondisi ini terjadi karena rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga data yang dibutuhkan untuk menghitung Indeks SPM Bidang Pendidikan belum tersedia secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, nilai capaian belum dapat ditetapkan dan belum dapat menggambarkan kondisi mutu pelayanan pendidikan secara objektif.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebagai dasar dalam memastikan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta menentukan langkah perbaikan dan tindak lanjut.
- b. Memperkuat tata kelola dan kualitas data pendidikan melalui pemutakhiran, verifikasi, dan validasi Dapodik untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengukuran capaian kinerja pendidikan secara akurat dan akuntabel.
- c. Mengoptimalkan pembinaan dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, termasuk pemenuhan standar layanan dan kebutuhan sarana prasarana pendidikan sesuai prioritas daerah.
- d. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, melalui penjangkauan Anak Tidak

Sekolah (ATS), pencegahan putus sekolah, serta sinergi dengan pemerintah desa/kelurahan dan pemangku kepentingan terkait.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu layanan pendidikan menjadi landasan dalam pelaksanaan program serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
- b. Adanya komitmen pimpinan dan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan layanan pendidikan.
- c. Telah terbangunnya koordinasi awal dengan pengawas sekolah sebagai bagian dari penguatan fungsi pembinaan dan supervisi terhadap satuan pendidikan, khususnya dalam mendukung pemenuhan standar layanan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Faktor Penghambat:

- a. Rapor Pendidikan Tahun 2026 belum dirilis, sehingga data dan informasi terkait capaian mutu pendidikan yang diperlukan sebagai salah satu bahan analisis dan evaluasi kinerja belum tersedia secara lengkap. Kondisi ini menyebabkan proses pemetaan capaian mutu dan penyusunan tindak lanjut peningkatan layanan pendidikan masih menunggu ketersediaan data resmi.
- b. Pemahaman terhadap indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan masih belum merata, baik dalam pemahaman terhadap indikator, sumber data, maupun mekanisme pengukurannya. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memastikan keseragaman pelaksanaan, pengumpulan data, dan pelaporan capaian SPM pada satuan pendidikan.
- c. Data SPM dari satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP belum seluruhnya valid, sehingga masih diperlukan proses verifikasi dan

validasi untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya ketersediaan data sebagai dasar perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengukuran capaian SPM bidang pendidikan.

Solusi Alternatif:

- a. Melakukan persiapan dan pemetaan awal menggunakan data pendidikan yang tersedia, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan rilis Rapor Pendidikan Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi dan penyusunan tindak lanjut peningkatan mutu Pendidikan.
- b. Meningkatkan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan kepada jajaran Dinas Pendidikan, pengawas, dan satuan pendidikan terkait indikator, mekanisme pengukuran, serta pemenuhan SPM bidang pendidikan agar terdapat kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan dan pelaporan.
- c. Memperkuat koordinasi, verifikasi, dan validasi data SPM secara berkala dengan melibatkan pengawas dan satuan pendidikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap data yang belum lengkap atau belum sesuai dengan kondisi riil sebagai dasar perencanaan dan pengukuran capaian SPM.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kinerja “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” merupakan upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, terukur, berorientasi pada hasil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan akuntabilitas kinerja diarahkan pada penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan daerah.

Sasaran kinerja ini memiliki indikator berupa Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas

kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. SAKIP mencerminkan sejauh mana perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal telah dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada hasil (outcome). Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan semakin baiknya tata kelola kinerja perangkat daerah dalam memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Nilai SAKIP menjadi salah satu instrumen untuk menilai tingkat kualitas penerapan manajemen kinerja perangkat daerah, mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan pelaporan dan evaluasi kinerja.

Pada periode Triwulan II, indikator ini memiliki target dan realisasi N/A, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 0%. Kondisi ini terjadi karena pada tahap awal tahun anggaran, penilaian atau penghitungan Nilai SAKIP belum dapat dilakukan, mengingat proses evaluasi SAKIP umumnya dilakukan secara periodik dan terintegrasi dalam satu siklus tahunan.

Selain itu, belum tersedianya nilai SAKIP juga disebabkan oleh proses pengumpulan dan konsolidasi dokumen kinerja perangkat daerah yang masih berjalan, termasuk dokumen perencanaan (Renstra dan Renja), pengukuran kinerja, serta laporan kinerja (LKjIP) yang menjadi komponen utama dalam penilaian SAKIP. Oleh karena itu, penilaian belum dapat dilakukan secara lengkap dan komprehensif pada triwulan ini.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah serta memastikan penyusunan laporan kinerja Triwulan II sesuai dengan ketentuan SAKIP.

- b. Mengarahkan pemutakhiran dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja agar selaras dengan sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta prioritas pembangunan pendidikan Kabupaten Banjar.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan II untuk mengidentifikasi perkembangan target, kendala pelaksanaan, serta menetapkan langkah tindak lanjut terhadap indikator yang belum mencapai target.
- d. Mengoordinasikan penguatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja melalui verifikasi serta pemenuhan data dukung yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengendalikan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dan pengawasan internal melalui koordinasi dengan bidang dan unit kerja terkait sebagai upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Pendorong:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan yang telah disusun sesuai ketentuan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Ketersediaan dokumen tersebut mendukung keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
- b. Meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh bidang dalam penerapan SAKIP menjadi salah satu faktor pendukung dalam penguatan akuntabilitas kinerja. Komitmen tersebut tercermin melalui pengendalian pelaksanaan program, pemantauan capaian indikator, serta upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
- c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta pengumpulan data dukung secara berkala mendukung proses pengendalian kinerja Triwulan II. Kegiatan tersebut membantu memastikan perkembangan capaian indikator dapat dipantau dan didukung dengan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Terjalannya koordinasi antarbidang dalam pemenuhan eviden penilaian SAKIP mendukung kelengkapan dan kualitas data dukung yang diperlukan dalam proses evaluasi. Koordinasi tersebut juga memperkuat sinergi antarunit kerja dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

Faktor Penghambat:

- a. Penilaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga capaian nilai SAKIP belum dapat diukur secara definitif pada Triwulan II. Kondisi ini menyebabkan evaluasi capaian indikator masih berfokus pada perkembangan implementasi komponen SAKIP dan kesiapan pemenuhan dokumen pendukung.
- b. Sebagian dokumen pendukung implementasi SAKIP masih dalam proses penyempurnaan, baik dari aspek kelengkapan maupun kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut memerlukan penguatan koordinasi dan percepatan penyelesaian dokumen agar seluruh eviden dapat tersedia secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Monitoring terhadap tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya optimal pada seluruh unit kerja, sehingga masih diperlukan penguatan pengendalian, koordinasi, dan pemantauan secara berkala untuk memastikan setiap rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti secara tepat dan terukur.

Solusi Alternatif:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi internal secara berkala terhadap komponen SAKIP sebagai langkah antisipasi sebelum pelaksanaan penilaian akhir tahun, sehingga potensi kekurangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
- b. Mempercepat penyempurnaan dokumen pendukung SAKIP melalui koordinasi dengan seluruh bidang dan unit kerja, serta melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum digunakan dalam proses penilaian.
- c. Memperkuat monitoring dan pengendalian tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dengan menetapkan penanggung jawab pada masing-masing unit kerja, memantau progres penyelesaian rekomendasi secara berkala, serta memberikan arahan terhadap tindak lanjut yang belum optimal.

- d. Meningkatkan koordinasi internal dan pendampingan kepada bidang/unit kerja untuk memastikan seluruh komponen SAKIP, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga tindak lanjut evaluasi, terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Membandingkan Realisasi Target Sasaran Kinerja Tahun ini dan Beberapa Tahun Terakhir

Table 3.3 Membandingkan Realisasi Target sasaran Tahun ini Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tahun 2025		Tahun 2024		Keterangan
				Realisasi triwulan II	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	Persen	N/A	N/A	96,56	111,63	54,44	54,44	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Persen	N/A	N/A	94,12	98,61	99,03	99,14	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	Persen	N/A	N/A	66,02	112,39	96	107,86	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	N/A	86,55	99,86	70,07	108,23	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Persen	N/A	N/A	98,08	98,08	106,64	106,64	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	N/A	97,89	97,89	108,45	120,76	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	N/A	64,73	102,71	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Persen	N/A	N/A	87,62	95,33	94,59	95,23	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	Persen	N/A	N/A	65,72	88,37	77,77	97,09	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tahun 2025		Tahun 2024		Keterangan
				Realisasi triwulan II	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pertama								
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Indeks	N/A	N/A	69,2	85,16	78,76	N/A	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	74,23	95,17	77,43	N/A	

4. Membandingkan Realisasi Sasasaran Strategis Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Table 3.3 Membandingkan Realisasi Indikator Sasaran Strategis Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi sampai dengan triwulan II	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	Persen	N/A	100	N/A	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Persen	N/A	97,79	N/A	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	Persen	N/A	74	N/A	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	87,17	N/A	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Persen	N/A	100	N/A	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	100	N/A	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi sampai dengan triwulan II	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	68,02	N/A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Persen	N/A	94,17	N/A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	76,19	N/A	
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Indeks	N/A	93,76	N/A	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	90	N/A	
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	Persen	N/A	100	N/A	

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi dan Nasional

Table 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi sampai dengan triwulan II	Realisasi Daerah lain atau Perangkat Daerah lain	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	Persen	N/A	-	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Persen	N/A	-	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	Persen	N/A	-	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak	Persen	N/A	-	N/A	N/A	

		Usia Dini						
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Persen	N/A	-	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	-	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/A	-	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Persen	N/A	-	N/A	N/A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Persen	N/A	-	N/A	N/A	
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Indeks	N/A	-	N/A	N/A	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	-	N/A	N/A	

Berdasarkan Tabel 3.4 hasil perbandingan realisasi pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan capaian daerah lain, provinsi dan nasional sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukuran secara menyeluruh. Hal ini karena seluruh indikator kinerja strategis masih berstatus N/A, baik pada sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan, Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan, maupun Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa data realisasi indikator dan data pembanding dari daerah lain, provinsi, maupun nasional belum tersedia atau belum dapat ditetapkan pada periode pelaporan.

Dengan demikian, capaian kinerja dan perbandingan kinerja antarwilayah belum dapat dianalisis secara optimal. Status N/A tidak menunjukkan tidak terlaksananya program dan kegiatan, tetapi lebih disebabkan oleh karakteristik indikator dan periode ketersediaan data. Selanjutnya, diperlukan pemutakhiran data, penguatan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar pengukuran kinerja pada periode berikutnya dapat dilakukan secara akurat dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Table 3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	N/A	• Pengelolaan Pendidikan (71,67) • Pengembangan Kurikulum (14,99) • Pendidik dan Tenaga Kependidikan (13,90)	-	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	N/A		-	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	N/A		-	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	N/A		-	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	N/A		-	Tidak efesiensi karena capaian kinerja dibawah 100 persen
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	N/A		-	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	N/A		-	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	N/A		-	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	N/A		-	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	N/A	• Pengelolaan Pendidikan (71,67) • Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)
				n (13,90)		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	99,34	-	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada

Berdasarkan Tabel 3.5, analisis efisiensi belum dapat dilakukan secara optimal karena capaian seluruh sasaran kinerja masih berstatus N/A. Hal ini disebabkan data capaian kinerja yang bersumber dari Rapor Pendidikan belum dirilis, sehingga hasil pengukuran kinerja belum tersedia dan belum dapat disajikan dalam laporan Triwulan II.

Di sisi lain, pelaksanaan anggaran telah berjalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, antara lain melalui program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, serta program pendidik dan tenaga kependidikan. Namun, realisasi anggaran tersebut belum dapat dibandingkan secara proporsional dengan capaian kinerja karena data kinerja belum tersedia. Pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, penyerapan anggaran mencapai 99,34%, namun belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja karena nilai SAKIP belum tersedia pada periode ini.

Dengan demikian, tingkat efisiensi pada Triwulan II belum dapat ditentukan. Setelah Rapor Pendidikan dirilis, data capaian kinerja perlu segera dimutakhirkan dan dianalisis untuk mengetahui tingkat efisiensi serta kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan pencapaian sasaran kinerja. Monitoring dan evaluasi juga perlu diperkuat agar pada triwulan berikutnya peningkatan penyerapan anggaran dapat diikuti dengan capaian kinerja yang terukur.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2026 untuk mendukung Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebesar Rp **271.904.545.257,-**. Adapun Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II tahun 2026 adalah sebesar Rp **254.295.036.993,-** (93,52% dari total anggaran Tw II).

Pencapaian realisasi anggaran dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut:

1. Realisasi Jenis Belanja

Table 3.6 Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran sampai dengan Triwulan II	Realisasi sampai dengan triwulan II	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	603.622.882.355,00	275.872.133.653,00	45,70
	a. Belanja Pegawai	497.797.044.918,00	268.273.012.799,00	53,89
	b. Belanja Barang dan Jasa	80.762.157.437,00	7.599.120.854,00	9,40
	c. Belanja Hibah	25.063.680.000,00	0	0
2	Belanja Modal	61.316.065.730,00	1.721.172.755,00	2,80

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Table 3.7 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sampai dengan Triwulan II	Realisasi Sampai dengan Triwulan II	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	215.122.401.627	213.705.752.744	99,34
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.927.200	20.680.537	86,43
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.568.800	5.313.093	70,20
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.044.000	7.904.560	98,27
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0	0	0,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0,00
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0,00
1.1.8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam	8.314.400	7.462.884	89,76

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sampai dengan Triwulan II	Realisasi Sampai dengan Triwulan II	Realisasi (%)
	Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	211.116.213.049	211.104.651.009	99,99
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	210.865.796.049	210.865.796.049	100,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.630.000	223.069.912	95,07
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.790.000	6.788.809	99,98
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.997.000	8.996.239	99,99
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.530.000	108.417.984	79,41
1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36.530.000	36.417.984	99,69
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	72.000.000	72,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	748.039.894	369.369.019	49,38
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.542.000	26.150.006	77,96
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.836.150	55.640.757	83,25
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.191.500	15.727.807	38,18
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.434.240	28.497.878	80,42
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.800.000	38.648.000	65,73
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.236.004	204.704.571	39,96
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.029.000	174.991.500	37,79
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	463.029.000	174.991.500	37,79
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.022.474.218	1.813.103.190	89,65

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sampai dengan Triwulan II	Realisasi Sampai dengan Triwulan II	Realisasi (%)
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.970.712	160.100.370	58,65
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.749.503.506	1.653.002.820	94,48
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.188.266	114.539.505	18,71
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.596.000	14.498.000	92,96
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.665.600	68.483.105	52,41
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.326.666	31.558.400	97,62
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	433.600.000	0	0,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.954.972.630	40.818.771.135	71,67
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.661.009.302	19.040.529.823	71,42
2.1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	357.503.000	332.496.500	93,01
2.1.2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0,00
2.1.3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0,00
2.1.4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0	0,00
2.1.5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	102.000.000	107.220.000	105,12
2.1.6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	20.000.000	19.700.000	98,50
2.1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	20.000.000	19.630.000	98,15
2.1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	30.000.000	19.800.000	66,00
2.1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	20.000.000	19.900.000	99,50

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sampai dengan Triwulan II	Realisasi Sampai dengan Triwulan II	Realisasi (%)
2.1.10	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	0,00
2.1.11	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	0	0,00
2.1.12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	619.869.000	211.704.150	34,15
2.1.13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	215.904.500	834.963	0,39
2.1.14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	211.903.000	196.054.109	92,52
2.1.15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	147.980.000	147.423.376	99,62
2.1.16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.968.750.002	14.676.927.900	73,50
2.1.17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	77.373.000	73.988.992	95,63
2.1.18	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	0	0,00
2.1.19	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0	0,00
2.1.20	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0	0	0,00
2.1.21	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0	0	0,00
2.1.22	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	0,00
2.1.23	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0	0	0,00
2.1.24	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	36.428.000	30.827.062	84,62
2.1.25	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	236.670.000	232.049.182	98,05
2.1.26	Pembangunan Ruang Kelas Baru	335.000.000	317.030.000	94,64
2.1.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	121.000.000	70.565.000	58,32

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sampai dengan Triwulan II	Realisasi Sampai dengan Triwulan II	Realisasi (%)
2.1.28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0	0	0,00
2.1.29	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	159.346.800	37.933.989	23,81
2.1.30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.581.530.000	2.526.444.600	97,87
2.1.31	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.200.000.000	0	0,00
2.1.32	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	199.752.000	0	0,00
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.789.291.828	7.590.083.131	70,35
2.2.1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0,00
2.2.2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0,00
2.2.3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0	0,00
2.2.4	Pembangunan Laboratorium	0	0	0,00
2.2.5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	20.000.000	19.918.000	99,59
2.2.6	Pembangunan Fasilitas Parkir	45.000.000	31.904.000	70,90
2.2.7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	115.000.000	64.620.000	56,19
2.2.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000	99.510.000	99,51
2.2.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	55.000.000	54.168.000	98,49
2.2.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	35.000.000	34.848.000	99,57
2.2.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	25.000.000	24.890.000	99,56
2.2.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43.000.000	42.831.000	99,61
2.2.13	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	0,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sampai dengan Triwulan II	Realisasi Sampai dengan Triwulan II	Realisasi (%)
2.2.15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	987.000.000	0	0,00
2.2.16	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	365.264.100	149.497.724	40,93
2.2.17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.633.400	0	0,00
2.2.18	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	357.065.000	352.079.909	98,60
2.2.19	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	43.547.000	42.741.277	98,15
2.2.20	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.110.785.828	6.315.398.109	77,86
2.2.21	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	47.013.500	46.050.863	97,95
2.2.22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	21.231.000	21.195.853	99,83
2.2.23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	56.975.000	56.543.475	99,24
2.2.24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0	0	0,00
2.2.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	46.070.000	45.670.585	99,13
2.2.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	46.956.000	45.757.306	97,45
2.2.27	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	0	0,00
2.2.28	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	0	0,00
2.2.29	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	222.751.000	117.534.030	52,76
2.2.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	0,00
2.2.31	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	0	0	0,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sampai dengan Triwulan II	Realisasi Sampai dengan Triwulan II	Realisasi (%)
	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
2.2.34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25.000.000	24.925.000	99,70
2.2.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0	0	0,00
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.546.406.000	5.237.422.989	54,86
2.3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	45.000.000	44.866.000	99,70
2.3.2	Pengadaan Mebel PAUD	0	0	0,00
2.3.3	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0	0	0,00
2.3.4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	150.000.000	0	0,00
2.3.5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.342.903.000	4.844.556	0,14
2.3.6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	433.331.000	115.510.672	26,66
2.3.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.974.000	16.898.963	16,74
2.3.8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.526.717.000	4.264.785.000	94,21
2.3.9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	0	0,00
2.3.10	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20.572.000	20.571.081	100,00
2.3.11	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	17.700.000	17.691.380	99,95
2.3.12	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	0,00
2.3.13	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	496.860.000	462.641.260	93,11
2.3.14	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0,00
2.3.15	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	0,00
2.3.17	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	316.936.000	202.009.136	63,74

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sampai dengan Triwulan II	Realisasi Sampai dengan Triwulan II	Realisasi (%)
	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
2.3.18	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6.320.000	4.920.594	77,86
2.3.19	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0	0	0,00
2.3.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	25.675.000	25.552.000	99,52
2.3.21	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	0	0	0,00
2.3.22	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	43.418.000	41.616.347	95,85
2.3.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20.000.000	15.516.000	77,58
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.958.265.500	8.950.735.192	89,88
2.4.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	200.500.000	0	0,00
2.4.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.000.000	3.998.419	99,96
2.4.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	26.650.000	16.891.145	63,38
2.4.4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.120.615.000	7.120.615.000	100,00
2.4.5	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	22.950.500	22.909.882	99,82
2.4.6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0	0	0,00
2.4.7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	13.100.000	13.100.000	100,00
2.4.8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	56.500.000	25.116.800	44,45
2.4.9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	0	0,00
2.4.10	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	0	0,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sampai dengan Triwulan II	Realisasi Sampai dengan Triwulan II	Realisasi (%)
2.4.12	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0	0	0,00
2.4.14	Pembangunan Ruang Kelas Baru	15.000.000	14.954.000	99,69
2.4.16	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.498.950.000	1.733.149.946	69,36
2.4.17	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	0,00
2.4.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	0	0	0,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	204.527.000	30.662.528	14,99
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30.169.000	15.331.264	50,82
3.1.1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30.169.000	15.331.264	50,82
3.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	174.358.000	15.331.264	8,79
3.2.1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	134.358.000	15.331.264	11,41
3.2.2	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	40.000.000	0	0,00
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	52.644.000	7.316.216	13,90
4.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	52.644.000	7.316.216	13,90
4.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.685.000	0	0,00
4.1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	22.959.000	7.316.216	31,87
Jumlah		272.334.545.257	254.562.502.623	93,47

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Perangkat Daerah belum dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum tersedianya target dan realisasi pada seluruh indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga nilai capaian pada periode Triwulan II tercatat sebesar 0%.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan, seluruh indikator yang meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta pendidikan kesetaraan masih berstatus N/A. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data yang diperlukan untuk melakukan pengukuran capaian indikator belum tersedia atau belum dapat ditetapkan pada periode pelaporan Triwulan II.

Selanjutnya, pada sasaran Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan, indikator Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan juga belum dapat diukur karena target dan realisasi Triwulan II masih berstatus N/A. Demikian pula pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum dapat dinilai pada Triwulan II karena penilaian SAKIP dilakukan pada periode akhir tahun.

Dengan demikian, capaian 0% pada tabel pengukuran kinerja tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi lebih mencerminkan bahwa sebagian besar indikator bersifat tahunan, menggunakan data yang tersedia secara periodik, atau hasil pengukurannya baru dapat ditetapkan pada akhir periode penilaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, pemutakhiran data dukung indikator, serta koordinasi antarunit kerja agar data realisasi dapat tersedia tepat waktu dan pengukuran kinerja pada periode berikutnya dapat dilakukan secara lebih akurat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tetap perlu diarahkan pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Perangkat Daerah perlu memastikan seluruh dokumen dan data pendukung kinerja terdokumentasi dengan baik serta melakukan pemantauan terhadap indikator yang belum dapat diukur, sehingga pada akhir tahun seluruh target kinerja dapat dievaluasi secara komprehensif dan dapat menjadi dasar dalam perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Sementara itu, dari sisi keuangan, realisasi anggaran mencapai Rp254.295.036.993 atau 93,52% dari target sebesar Rp271.904.545.257. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya optimal, yang dipengaruhi oleh masih berlangsungnya proses persiapan kegiatan, penyelesaian perencanaan teknis, serta proses pengadaan barang dan jasa. Secara keseluruhan, kinerja dan penyerapan anggaran menunjukkan perkembangan yang baik, namun diperlukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada triwulan berikutnya.

Secara umum, terdapat perbedaan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan, di mana tingkat penyerapan anggaran telah mencapai persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terealisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sementara beberapa sasaran kinerja masih berada dalam proses penyelesaian dan belum seluruhnya dapat dicapai pada periode pelaporan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pelaksanaan kegiatan yang memerlukan waktu lebih panjang untuk menghasilkan output kinerja, meskipun sebagian besar komponen pembiayaannya telah direalisasikan.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II, khususnya adanya kesenjangan antara capaian kinerja dengan realisasi keuangan, diperlukan langkah perbaikan dan tindak lanjut untuk memastikan penggunaan anggaran memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian sasaran strategis. Adapun rekomendasi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keterkaitan antara realisasi anggaran dengan pencapaian kinerja, dengan memastikan setiap penggunaan anggaran diarahkan secara langsung pada pencapaian output dan outcome yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.
- b. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, khususnya terhadap kegiatan yang memiliki tingkat penyerapan anggaran tinggi tetapi capaian output atau indikator kinerjanya belum menunjukkan perkembangan yang sebanding.
- c. Mempercepat penyediaan dan pemutakhiran data kinerja, terutama untuk indikator APS, APK, APM, Indeks SPM Bidang Pendidikan, dan indikator lainnya yang masih berstatus N/A, sehingga perkembangan capaian kinerja dapat diketahui secara lebih akurat.

- d. Meningkatkan koordinasi antarunit kerja dan pihak terkait dalam proses pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pelaporan data kinerja agar data dukung tersedia tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang masih dalam tahap persiapan, perencanaan teknis, maupun proses pengadaan barang dan jasa, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- f. Melakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran, terutama pada kegiatan yang telah memiliki realisasi keuangan tinggi namun belum menghasilkan capaian kinerja yang terukur, sehingga dapat dilakukan penyesuaian strategi pelaksanaan apabila diperlukan.
- g. Menetapkan langkah mitigasi terhadap risiko keterlambatan pencapaian target, termasuk menyusun jadwal percepatan dan menetapkan penanggung jawab yang jelas untuk setiap kegiatan dan indikator kinerja.

2. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Triwulan II, Perangkat Daerah perlu melakukan beberapa langkah konkret sebagai berikut:

- a. Melakukan review terhadap seluruh indikator kinerja yang masih berstatus N/A dan memastikan mekanisme, sumber data, periode pengukuran, serta penanggung jawab pengumpulan data telah ditetapkan dengan jelas.
- b. Melakukan pemantauan bulanan terhadap hubungan antara realisasi anggaran dan perkembangan output kegiatan, sehingga potensi ketidakseimbangan antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
- c. Menyusun rencana percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan Triwulan IV, terutama terhadap kegiatan yang belum terlaksana atau belum menghasilkan output sesuai target.
- d. Melakukan percepatan proses perencanaan teknis dan pengadaan barang/jasa yang masih menjadi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan, dengan melakukan koordinasi intensif antara unit teknis, pengelola keuangan, dan unit pengadaan.
- e. Melakukan pemutakhiran data capaian kinerja secara berkala dan memastikan setiap data telah dilengkapi dengan dokumen atau bukti dukung yang memadai sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- f. Melakukan evaluasi internal terhadap kegiatan dengan penyerapan anggaran tinggi namun capaian kinerja masih rendah, untuk mengidentifikasi penyebab kesenjangan dan menetapkan tindakan korektif.

- g. Memastikan bahwa realisasi keuangan pada Triwulan III dan IV diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja, sehingga peningkatan penyerapan anggaran diikuti dengan peningkatan output dan outcome.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif menjelang akhir tahun, termasuk melakukan rapat evaluasi berkala untuk memastikan seluruh target kinerja dan anggaran dapat dicapai sesuai rencana.
- i. Untuk indikator yang pengukurannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, perlu dilakukan persiapan data dan dokumen pendukung sejak Triwulan II dan III, sehingga proses pengukuran pada akhir tahun dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan menghasilkan data yang valid.
- j. Menjadikan hasil evaluasi Triwulan II sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III dan IV, dengan menitikberatkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran serta pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.

Dengan pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut tersebut, diharapkan kesenjangan antara realisasi keuangan dan capaian kinerja dapat diminimalkan. Penyerapan anggaran yang telah mencapai 93,52% selanjutnya perlu diimbangi dengan peningkatan capaian output dan outcome, sehingga pada akhir tahun terdapat keselarasan antara penggunaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



Hj. Liana Penny, ST.,MS
Pembina Tk. I
NIP. 198007122005012013

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja PD

https://drive.google.com/file/d/1_faDHKUeIXaS7TrWBm-81ZYMgWDydMcw/view?usp=sharing

2. Rencana Aksi

https://drive.google.com/file/d/1rvN22XfCAliCl-GIK8nE_GDWWM69Gkrl/view?usp=sharing